

SKRIPSI

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH DAN KEPATUHAN PERUNDANG -
UNDANGAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

MUH. BERKAH HERIYANSYAH



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN KEPATUHAN PERUNDANG - UNDANGAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**MUH. BERKAH HERIYANSYAH
A031191173**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN KEPATUHAN PERUNDANG - UNDANGAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI

disusun dan diajukan oleh
MUH. BERKAH HERIYANSYAH
A031191173

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 11 Juli 2023

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., Ak., M.Si., CA.
NIP. 19650731 199103 2 002

Pembimbing II

Prof. Dr. Asri Usman, S.E., Ak., M.Si., CA., CRA., CRP
NIP. 19651018 199412 1 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP. 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN KEPATUHAN PERUNDANG - UNDANGAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI

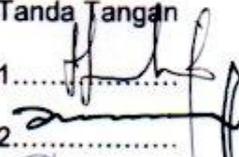
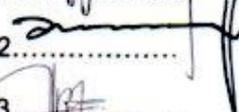
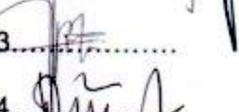
disusun dan diajukan oleh

MUH. BERKAH HERIYANSYAH
A031191173

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **10 Agustus 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

| No. Nama Penguji | Jabatan | Tanda Tangan |
|--|------------|--|
| 1. Prof. Dr. Hj. Haliah , S.E., M.Si., Ak., CA., | Ketua | 1.....  |
| 2. Prof. Dr. Asri Usman, S.E., Ak., M.Si., CA., CRA.,CRP | Sekretaris | 2.....  |
| 3. Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., AseanCPA. | Anggota | 3.....  |
| 4. Rahmawati HS, S.E., M.Si., Ak., CA., | Anggota | 4.....  |

Ketua Departemen Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin





Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA.

NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muh. Berkah Heriyansyah
NIM : A031191173
Departemen/Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kepatuhan Perundang -Undangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi”

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 10 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Muh. Berkah Heriyansyah

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa peneliti kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kepatuhan Perundang-undangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi”. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program Strata Satu Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, yaitu Abdul Azis,S.Sos dan Hj.Hafidah,S.Sos; serta seluruh keluarga besar peneliti yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memberikan dukungan, motivasi, serta bimbingan kepada peneliti.
2. Prof. Dr. Hj. Haliah, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing I dan Prof. Dr. Asri Usman, S.E., Ak., M.Si, CA., CRA., CRP selaku dosen pembimbing II yang telah menjadi orang tua peneliti dan tidak lelah dalam membimbing peneliti selama proses penyusunan hingga skripsi ini selesai.
3. Drs. Rusman Thoeng, M.Com, BAP dan Afdhal Madein, SE., M.Si. selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin serta selaku penguji peneliti yang telah memberikan saran untuk menyempurnakan skripsi ini.
4. Rahmawati HS, S.E., Ak., .Si., Ak., CA dan Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., Asean CPA selaku penguji peneliti yang telah memberikan saran untuk menyempurnakan skripsi ini.

5. Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA. selaku Ketua Departemen Akuntansi dan Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., Asean CPA selaku Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas bantuan yang diberikan kepada peneliti.
8. Teman – teman SCI-FI19 yang telah berkontribusi banyak dalam memberikan dukungan, bantuan, serta semangat selama berkuliah di Universitas Hasanuddin.
9. Teman seperjuangan Songkoth Ajie yang menemani peneliti dalam suka dan duka selama berkuliah di Universitas Hasanuddin.
10. Sahabat-sahabat sehati penulis yang selalu memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan penelitian ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan serta dukungan secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Merah Universitas Hasanuddin Makassar.

Makassar, 10 Juli 2023

Muh. Berkah Heriyansyah

ABSTRAK

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kepatuhan Perundang - Undangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi

The Influence of Application of Government Accounting Standards and Compliance with Legislation on the Quality of Financial Reports of the Regional Government of Polewali Mandar Regency with the Government's Internal Control System as a Moderating Variable

Muh. Berkah Heriyansyah
Haliah
Asri Usman

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah dan Kepatuhan Perundang-undangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan total 120 sampel Aparatur Sipil Negara dengan metode sampel *cluster sampling*. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebar melalui Badan Keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan analisis *Partial T Test* dan *R Square Analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah dan Kepatuhan Perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal pemerintah mampu memoderasi pengaruh standar akuntansi pemerintahan dan kepatuhan perundang-undangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: *Standar Akuntansi Pemerintah, Kepatuhan, SPIP, LKPD*

This study aims to determine the effect of Government Accounting Standards and Compliance with Legislation on the information quality of Regional Government Financial Reports. The object of this research is the Polewali Mandar Local Government, with a total of 120 samples of State Civil Apparatus using a cluster sampling method. The data in this study are primary data obtained from questionnaires distributed through the Polewali Mandar Regency Government Finance Agency. This study uses Partial T-Test analysis and R square Analysis. The study results show that Government Accounting Standards and Legislation Compliance significantly affect the Quality of Regional Government Financial Reports. The government's internal control system can moderate the effect of government accounting standards on the quality of local government financial reports, and the government's internal control system can moderate the effect of statutory compliance on the quality of local government financial reports.

Keywords: *Government Accounting Standards, Compliance, Government Internal Control System, Information Quality of Financial Reports.*

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| PRAKATA | v |
| ABSTRAK | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian | 6 |
| 1.4.1 Kegunaan Teoritis | 6 |
| 1.4.2 Kegunaan Praktis | 6 |
| 1.5 Ruang Lingkup Penelitian | 7 |
| 1.6 Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| 2.1 Landasan Teori | 9 |
| 2.1.1 <i>Stewardship Theory</i> | 9 |
| 2.1.2 <i>Signalling Theory</i> | 10 |
| 2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintah | 11 |
| 2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan | 12 |
| 2.1.5 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | 14 |
| 2.1.6 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah | 17 |
| 2.1.7 Kepatuhan Perundang-undangan | 19 |
| 2.2 Penelitian.Terdahulu | 20 |
| 2.3 Kerangka Konseptual | 22 |
| 2.4 Hipotesis | 22 |
| 2.4.1 Pengaruh Penerapan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar | 22 |
| 2.4.2 Pengaruh Kepatuhan Perundang-undangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar | 23 |
| 2.4.3 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memperkuat hubungan antara Penerapan Standar Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan | 24 |
| 2.4.4 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memperkuat hubungan antara Kepatuhan Perundang-Undangan dan Kualitas Laporan Keuangan | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 27 |
| 3.1 Rancangan Penelitian | 27 |
| 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian | 27 |
| 3.3 Populasi dan Sampel | 28 |
| 3.3.1 Populasi | 28 |
| 3.3.2 Sampel | 28 |
| 3.4 Jenis dan Sumber.Data | 29 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 30 |
| 3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional | 30 |

| | |
|--|-----------|
| 3.6.1 Variabel Penelitian | 30 |
| 3.6.2 Definisi Operasional | 31 |
| 3.7 Instrumen Penelitian | 34 |
| 3.8 Analisis Data | 34 |
| 3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif | 34 |
| 3.8.2 Uji Kualitas Data | 35 |
| 3.8.3 Uji Asumsi Klasik | 35 |
| 3.8.4 Uji Hipotesis | 37 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 40 |
| 4.1 Deskripsi Data | 40 |
| 4.2 Karakteristik Responden | 41 |
| 4.3 Analisis Statistik Deskriptif | 43 |
| 4.4 Hasil Uji Kualitas Data | 44 |
| 4.4.1 Hasil Uji Validitas | 44 |
| 4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas | 47 |
| 4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik | 48 |
| 4.5.1 Uji Normalitas | 48 |
| 4.5.2 Uji Multikolinieritas | 49 |
| 4.5.3 Hasil Uji Heterokedastisitas | 50 |
| 4.6 Uji Hipotesis | 52 |
| 4.6.1 Regresi linear Variabel Moderasi | 52 |
| 4.7 Pembahasan Hasil Analisis Data | 57 |
| 4.7.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 57 |
| 4.7.2 Pengaruh Kepatuhan Perundang-Undangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 58 |
| 4.7.3 Sistem pengendalian Internal Pemerintah Memperkuat Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 60 |
| 4.7.4 Sistem pengendalian Internal Pemerintah Memperkuat Hubungan Kepatuhan Perundang-undangan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 61 |
| BAB V PENUTUP | 63 |
| 5.1 Kesimpulan | 63 |
| 5.2 Keterbatasan Penelitian | 64 |
| 5.3 Saran | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA | 65 |
| Lampiran 1 | 70 |
| Lampiran 2 | 71 |
| Lampiran 3 | 78 |
| Lampiran 4 | 91 |
| Lampiran 5 | 110 |
| Lampiran 6 | 111 |
| Lampiran 7 | 113 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| 1.1 Perkembangan Opini BPK terhadap Kabupaten Polewali Mandar | 4 |
| 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu..... | 20 |
| 3.1 Jumlah Populasi | 28 |
| 3.2 Teknik Pengambilan Sampel | 29 |
| 3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian..... | 33 |
| 4.1 Rincian Penyebaran Kuesioner | 40 |
| 4.2 Karakteristik Responden | 41 |
| 4.3 Statistik Deskriptif Masing-Masing Variabel..... | 43 |
| 4.4 Tabel Hasil Uji Validitas..... | 44 |
| 4.5 Hasil Uji Reliabilitas | 47 |
| 4.6 Kolmogorov-Smirnov Test | 49 |
| 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas | 50 |
| 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas <i>Glejser</i> | 52 |
| 4.9 Hasil Uji t..... | 53 |
| 4.10 Hasil Pengujian Hipotesis..... | 55 |
| 4.11 Hasil Uji R Square | 56 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--------------------------------|----|
| 4.1 Hasil Uji Normalitas | 48 |
| 4.2 Grafik Scatter plot..... | 51 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan dengan berkualitas tinggi dibutuhkan karena digunakan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Kualitas Informasi dari laporan keuangan diukur dari penyajian yang relevan, andal, komparatif, dan bisa dipahami. Informasi keuangan yang memiliki kualitas buruk memberi kesempatan terjadinya penyimpangan dan misinformasi bagi pengguna. Hal ini dapat menjadi penyebab terjadinya *fraud*, korupsi, bahkan tindak pidana. Masyarakat akan mengalami dampak buruk dari keberlangsungan buruknya kualitas laporan keuangan ini. Sebagai bentuk dalam penyampaian informasi keuangan sehingga pemerintah daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan ini merujuk kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pedoman akuntansi yang digunakan dalam penyusunannya. LKPD ini termasuk wujud tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan pada bidang keuangan sesuai UU Keuangan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Pemerintah daerah Nomor 32 Tahun 2004.

Menurut UU No. 15 Tahun 2006 dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berwenang melakukan audit tahunan terhadap LKPD dengan maksud mengawasi pengelolaan dan pelaporan keuangan yang telah penyelenggara negara lakukan. BPK melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan untuk menentukan kepatuhan terhadap kebijakan akuntansi, mengevaluasi aktivitas operasional, dan pemeriksaan dengan tujuan lain yang telah ditetapkan. BPK akan memberikan opini sebagai asurans terhadap kualitas LKPD yang telah

diaudit. Hal ini sejalan dengan Djanegara (2017) mengungkapkan bahwa opini audit dapat dijadikan tolak ukur kualitas dari laporan keuangan.

Undang-undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara menetapkan persyaratan BPK berkaitan pada kewajaran informasi dalam laporan keuangan; (i) Kesesuaian pada standar akuntansi pemerintah, (ii) Kecukupan dalam pengungkapan informasi laporan keuangan, (iii) Kepatuhan perundang-undangan, (iv) Efektivitas sistem pengendalian internal. BPK selanjutnya akan merilis opini terhadap laporan yang diperiksanya yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), serta Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tinggi terdapat beberapa faktor yang diperlukan yaitu harus memiliki standar dalam penyusunan dan penyajiannya, perlunya internal kontrol dalam setiap aktivitas pengelolaan keuangan, dan perlunya aturan yang mengatur setiap aktivitas yang dilakukan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi pengguna laporan keuangan tersebut. Acuan yang dijadikan standar bagi pemerintah ialah PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam menyusun laporan keuangan dengan berkualitas. Penelitian Jati (2019) memberi kesimpulan yang mendukung bahwa dengan menerapkan SAP dapat memberikan peningkatan kualitas dari LKPD yang dihasilkan Pemerintah Daerah. Namun terdapat perbedaan hasil yang diperoleh oleh penelitian Azzindani (2019) yang menyatakan tidak lagi ada pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas LKPD karena SAP diwajibkan pada proses penyusunan laporan keuangan.

Faktor lain yang memengaruhi kualitas LKPD ialah kepatuhan pemerintah pada perundang-undangan. Kepatuhan perundang-undangan ini ditujukan sebagai rambu bagi pemerintah dalam menjalankan aktivitas keuangannya.

Mawuntu *et al.* (2019) memberi pernyataan kepatuhan pemerintah berbanding lurus dengan kualitas laporan keuangan, artinya semakin patuh pemerintah maka kualitas LKPD akan semakin baik, namun bertentangan dengan Khairudin (2017) memperlihatkan bahwasanya kepatuhan pemerintah pada perundang-undangan memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas informasi LKPD.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berperan sangat krusial dalam menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi. Efektivitas Penerapan pengendalian intern akan memberi hasil atau jaminan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan secara obyektif, benar, dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan tujuan pengendalian internal *COSO-Integrated framework* yaitu efisiensi dan efektivitas dalam aktivitas operasi, pelaporan keuangan yang andal, dan kepatuhan pada hukum yang berlaku .

Rahmadani dan Zulaikha (2023) menyatakan bahwa SPI mampu memperkuat penerapan SAP dalam meningkatkan kualitas LKPD. Dengan adanya SPIP dapat menjadi moderator hubungan penerapan SAP dan kualitas laporan keuangan. Sementara penelitian Adhitama (2019) menunjukkan hasil berbeda, yaitu SPIP tidak mampu memoderasi hubungan SAP dan kepatuhan perundang-undangan terhadap Kualitas LKPD .

Aswar *et al.* (2021) menyatakan bahwa konsistensi penerapan pengendalian internal akan meningkatkan pengungkapan laporan keuangan karena pengawasan dapat meningkatkan kepatuhan peraturan perundang-undangan dan anggaran pemerintah daerah. Hal ini menandakan bahwa menjalankan pengendalian internal dengan baik dapat menaikkan jumlah pengungkapan laporan keuangan karena pengawasan merupakan fungsi utama yang melekat dalam peraturan perundang-undangan dan APBD.

Kabupaten Polewali Mandar termasuk daerah otonom yang berada di sebelah barat Sulawesi sesuai UU No. 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi dan PP No. 74 Tahun 2005 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar,. berlandaskan LHP-BPK atas LKPD Kabupaten Polewali Mandar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*) dalam tujuh tahun berturut-turut dari tahun 2016 – 2022.Hal ini memberi gambaran bahwa BPK telah memberi penilaian baik pada Kualitas LKPD Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Tabel 1.1 Perkembangan Opini BPK terhadap Kabupaten Polewali Mandar

| Tahun | Opini BPK |
|-------|--------------------------------|
| 2016 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 2017 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 2018 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 2019 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 2020 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 2021 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 2022 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester BPK-RI 2023

Terdapat banyak penelitian terkait determinan kualitas informasi LKPD, namun hasil penelitian ditemukan inkonsistensi hasil hasil antara satu dengan lain, hasil studi punya perbedaan pada variabel Penerapan SAP, Penerapan SPIP, dan *Kepatuhan Perundang-Undangan*, serta tidak adanya objek penelitian terhadap Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini juga akan memakai data primer dengan objek penelitian Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Dengan itu, hasil yang diharapkan lebih representatif serta lengkap sebab menggambarkan hasil yang terjadi dilapangan (*field research*) .Maka judul yang diajukan pada penelitian ini yaitu “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kepatuhan Perundang -

Undangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas LKPD kabupaten Polewali Mandar?
2. Apakah Kepatuhan perundang-undangan berpengaruh terhadap Kualitas LKPD kabupaten Polewali Mandar?
3. Apakah SAP berpengaruh signifikan terhadap Kualitas LKPD Kabupaten Polewali Mandar yang dimoderasi oleh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah?
4. Apakah Kepatuhan atas perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas LKPD Kabupaten Polewali Mandar yang dimoderasi oleh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, secara umum tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis pengaruh penerapan SAP terhadap Kualitas LKPD Kabupaten Polewali Mandar.
2. Menganalisis pengaruh Kepatuhan Perundang-undangan terhadap Kualitas LKPD Kabupaten Polewali Mandar.

3. Menganalisis pengaruh penerapan SAP terhadap Kualitas LKPD Kabupaten Polewali Mandar yang dimoderasi oleh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
4. Menganalisis pengaruh Kepatuhan Perundang-undangan terhadap Kualitas LKPD Kabupaten Polewali Mandar yang dimoderasi oleh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Besar harapan agar penelitian ini mampu memberi kontribusi yang mengungkapkan pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kepatuhan Perundang-Undangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan teori-teori yang telah dikenal dalam kajian dan penelitian akuntansi. Penelitian ini diharapkan dapat membuat perencanaan serta kebijakan yang tepat di masa mendatang guna perbaikan berdasarkan hasil penelitian kinerja yang telah dilakukan penulis.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan

Besar harapan agar penelitian ini menghasilkan informasi yang mendeskripsikan keadaan pemerintah daerah sebagai tahapan awal dalam menyusun rencana audit.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian untuk mengukur seberapa baik dan buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah dan menjadi pertimbangan bagi aparat pengendalian internal pemerintah

daerah dalam membuat dan menentukan keputusan untuk mencapai tujuannya.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan yang faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD dan dapat menjadi acuan guna mendukung penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik analisis kinerja keuangan perusahaan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menguji tentang pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kepatuhan Perundang-undangan terhadap Kualitas LKPD Kabupaten Polewali Mandar.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang serta rumusan masalah, tujuan, kegunaan, serta ruang lingkup, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan teori yang menjadi landasan penelitian, studi terdahulu yang terkait dengan studi ini, struktur penelitian, serta hipotesis studi yang akan menjadi penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab III memaparkan struktur penelitian, pengertian dari masing –masing variabel operasional, populasi hingga sampel yang digunakan, jenis ,sumber, dan metode pengumpulan data, metodologi dan uji yang akan digunakan.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS

Bab ini memaparkan secara garis besar mengenai objek studi, hasil studi dan data yang dikumpulkan serta interpretasinya.

BAB V: PENUTUP

Bab penutup, berisikan kesimpulan serta saran dari temuan penelitian yang bisa dipakai sebagai referensi untuk studi selanjutnya..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Stewardship Theory*

Stewardship Theory dikembangkan oleh Donaldson dan Davis (1991) memberi definisi bahwa tidak terdapat kondisi dimana manajemen memiliki motivasi untuk tujuan-tujuan individu namun lebih mengutamakan kepentingan organisasi sebagai tujuan utama. Terdapat asumsi yang dibangun dalam teori ini yaitu didasarkan pada manusia dapat dipercaya, berintegritas, dan mampu mempertanggungjawabkan tindakannya untuk pihak lain.

Teori ini dapat diimplementasikan dalam organisasi sektor publik khususnya pemerintah daerah karena pemerintah daerah bertujuan menyediakan fasilitas dan layanan publik dan memastikan pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) mendorong penerapan teori *stewardship* pada organisasi sektor publik. Pendekatan ini sesuai dengan pernyataan Haliah (2012) yaitu organisasi sektor publik seperti pemerintah dan non-profit organisasi memiliki relevansi dengan konsep *stewardship theory*. Tata kelola yang dijalankan pemerintah berperan sebagai *steward* karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pemberian layanan, tingkat kapasitas manajemen publik, pemberian honorarium maupun denda yang digunakan, serta intensitas informasi yang dibutuhkan (Slyke, 2007). Dengan pendekatan ini, tujuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan akuntabilitas yang baik terhadap masyarakat dapat diwujudkan dengan lebih efektif pada entitas publik. Pemerintah dalam hal ini selaku *steward* melakukan fungsi pengelolaan, dan masyarakat sebagai *principals* bertindak sebagai pemilik sumber daya.

Bestari (2023) menjelaskan Teori *stewardship* memberi asumsi terkait korelasi yang kuat terkait keberhasilan organisasi dan kepuasan masyarakat (*principal*). Teori ini digunakan sebagai konsep dasar dalam organisasi pada sektor publik, aparat pemerintah selaku *steward* memberi pelayanan pada masyarakat sebagai pemilik (*principal*), Pemerintah bertanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan kepada masyarakat dengan kualitas yang optimal serta memenuhi karakteristik kualitatif yang relevan.

Dalam penyusunan laporan LKPD, pemerintah daerah yang berperan sebagai *steward* berkewajiban untuk memberikan laporan yang bermanfaat bagi *principals* (masyarakat). Implikasi teori *stewardship* pada penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan mengenai keberadaan pemerintah daerah sebagai pengemban amanat publik dalam menyajikan informasi keuangan dengan kualitas tinggi. Informasi keuangan yang baik mendukung penggunaannya dalam menentukan keputusan. Dalam mengemban amanat tersebut, *steward* harus mengerahkan segala kemampuan dalam menyusun LKPD sebagai bentuk pengelolaan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan.

2.1.2 Signalling Theory

Spence (1973) ialah pencetus teori ini mendefinisikan signal sebagai upaya penyedia informasi untuk memberi gambaran situasi secara akurat pada pihak lain sehingga punya kapabilitas dalam mengambil keputusan bahkan dalam situasi yang tidak pasti. Teori *signalling* diciptakan atas dasar pengiriman signal informasi dari pihak yang punya lebih banyak informasi kepada mereka yang punya sedikit informasi di dalam perusahaan. Penerapan Teori signal dalam sektor publik ditujukan terhadap upaya pemerintah mengurangi

asimetri informasi dengan mendistribusikan laporan keuangan berkualitas tinggi sebagai sinyal sehingga implementasi kegiatan pemerintahan bisa diketahui masyarakat secara transparan.

Setyowati (2016) menyatakan bahwasanya Pemerintah berupaya menyampaikan pesan positif kepada masyarakat dengan harapan masyarakat terus mendukung pemerintah agar bisa berfungsi secara efektif. Publik harus diberi tahu tentang keberhasilan pemerintah baik untuk alasan akuntabilitas maupun elektoral. Rosalia dan Zulkarnain (2020) menyatakan bahwasanya Pemerintah yang mendapatkan pandangan WTP cenderung memberi sinyal kinerja yang positif kepada publik.

Bangsawan (2017) berpendapat ketika BPK RI memberi pendapat tentang kualitas LKPD akan memberi *signal* kepada masyarakat. *Signal* tersebut mencerminkan bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan mereka, apakah baik atau buruk. Disamping itu, hal ini membantu dalam mengatasi ketimpangan informasi antara pemerintah dan masyarakat.

2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 mendefinisikan Standar Akuntansi Pemerintah adalah “prinsip akuntansi yang digunakan sebagai acuan pada penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah”. LKPD harus sesuai Standar akuntansi Pemerintah yang sejalan dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menggantikan PP No. 24 Tahun 2005, pemerintah harus menggunakan metode akuntansi akrual seperti tercantum dalam PP No. 71 Tahun 2010 terkait SAP. Baru pada laporan tahunan 2015 PP No. 71 Tahun 2010 diterapkan dengan basis kas menuju akrual.

2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan

Wilkinson (2000) menyatakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas memiliki kapabilitas untuk menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk memenuhi persyaratan sebagai acuan ataupun bahan dalam mengambil suatu keputusan, informasi yang termuat pada laporan keuangan perlu memenuhi standar kualitas yang tinggi. Ketepatan keputusan sangat tergantung pada nilai informasi yang diberikan, dan nilai tersebut dipengaruhi oleh kualitas informasi yang ada. Kualitas informasi yang bermanfaat mencakup relevansi, akurasi, ketepatan waktu, kekompakan, kejelasan, kuantitas, dan konsistensi. Semua faktor ini berkontribusi untuk memastikan informasi benar-benar berharga dan dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan.. Hal inilah yang diadopsi pemerintah Indonesia dengan menjadikan standar normatif yang harus diwujudkan dalam sebuah LKPD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, LKPD dikatakan berkualitas yaitu apabila telah memenuhi persyaratan normatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

a. Relevan

Unsur relevan dari laporan keuangan yaitu ketika informasi yang dimuat memberi pengaruh pada pengguna dalam mengambil keputusan dengan menganalisis peristiwa masa lalu hingga peristiwa saat ini dan memperkirakan peristiwa serta tindakan yang diambil di masa depan, mengoreksi atau mengevaluasi ekspektasi di masa lalu. Maka dari itu, informasi pada laporan keuangan dianggap relevan apabila dikaitkan pada tujuan penggunaannya. Laporan keuangan dianggap relevan jika memenuhi ketentuan berikut.

- 1) Memiliki nilai umpan balik. Manfaat Informasi dapat memberi kemampuan pengguna melakukan koreksi dan menyesuaikan harapan mereka pada masa lampau.
- 2) Memiliki nilai prediktif. Laporan keuangan dapat memberi proyeksi kejadian di masa akan datang sesuai perolehan atas peristiwa masa lampau hingga kini.
- 3) Ketepatan waktu. Akurat dalam menyediakan informasi secara tepat waktu agar pengguna memiliki kemampuan dalam menentukan keputusan
- 4) Lengkap. Laporan Keuangan yang tersaji secara menyeluruh, memuat segala informasi keuangan yang memberi pengaruh menentukan keputusan yang diambil dengan memberi gambaran atas hambatan yang dialami. Informasi yang terdapat pada laporan keuangan harus diungkapkan secara menyeluruh sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan laporan keuangan tersebut.

b. Andal

Nilai Informasi yang terdapat pada laporan keuangan terbebas dari misinformasi dan kesalahan secara material, mengungkap semua realita yang sesuai, dan juga dapat dikonfirmasi. Laporan yang dihasilkan bisa saja relevan, namun apabila dari penyajian tidak bisa diandalkan dapat menimbulkan potensi kekeliruan dalam penggunaannya. Informasi yang andal memerlukan beberapa syarat.

- 1) Penyajian jujur. Laporan memberi gambaran realitas kejadian maupun peristiwa lain yang harus disajikan dengan wajar .
- 2) Dapat diverifikasi. Hasil akan selalu konsisten jika berbagai pihak memverifikasi informasi laporan keuangan.

3) Netralitas. Laporan disusun dan disajikan sesuai kepentingan publik dan tidak memihak kepada kepentingan suatu pihak.

c. Dapat dibandingkan

Manfaat informasi pada laporan keuangan memiliki kualitas yang optimal apabila dapat digunakan sebagai alat perbandingan antara laporan sebelum dan sesudahnya ataupun laporan yang dibuat instansi lain. Pengguna dapat melakukan banding dengan laporan internal dan eksternal. Melakukan banding secara internal hanya bisa dijalankan jika terdapat konsistensi penerapan standar yang sama pada setiap tahunnya. Pengguna dapat melakukan perbandingan secara eksternal dapat dilakukan hanya dengan entitas dengan pedoman akuntansi yang sama. Pemerintah harus mengungkapkan apabila terjadi perubahan pedoman akuntansi dari tahun sebelumnya.

d. Dapat dipahami

Informasi yang dikatakan bisa dipahami jika laporan keuangan disajikan menggunakan format dan diksi kata yang sesuai pada kemampuan pengguna dalam memahaminya. Dengan demikian, pengguna selalu dianggap telah memiliki pemahaman yang baik terhadap aktivitas serta operasi dari penyusun laporan, dan punya keinginan memahami informasi yang tersaji.

2.1.5 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewajiban pada pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas keuangan dalam bentuk laporan,

termasuk Laporan Realisasi Anggaran, sebagai bagian dari kewajiban melaksanakan pertanggungjawaban keuangan daerah. Penyusunan laporan keuangan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana tercantum dalam PP No. 24 Tahun 2005 dengan basis kas menuju akrual. Kemudian digantikan dengan PP No. 71 Tahun 2010 dengan basis akrual..

Keadaan keuangan entitas dan semua transaksi yang dilakukan selama periode pelaporan harus lengkap, akurat, dan relevan untuk memenuhi PP No. 71 Tahun 2010. Tujuan laporan keuangan pemerintah termasuk sebagai komparasi terkait estimasi pendapatan, pengeluaran, transfer, dan pengeluaran lain sesuai pada penetapan anggaran, evaluasi terkait efektivitas dan efisiensi entitas, dan memverifikasi kepatuhan atas perundang-undangan yang relevan.

Selain merinci proses yang diikuti dan hasil yang diamati selama operasi organisasi, laporan keuangan pemerintah memberikan fungsi berikut (PP 71 Tahun 2010).

1. Akuntabilitas

Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa organisasi menggunakan dana dan kebijakan yang telah diberikan kepada mereka untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan secara terstruktur sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

2. Manajemen

Berkontribusi pada penilaian tindakan yang diambil selama periode pelaporan untuk memastikan kepentingan publik dalam penyusunan rencana strategis, tata kelola, dan kontrol pemerintah atas semua asset, liabilitas, hingga ekuitasnya.

3. Transparansi

Mengingat bahwa masyarakat memiliki hak penuh atas akses informasi yang lengkap dan tidak terbatas mengenai kepatuhan pemerintah terhadap aturan perundang-undangan terkait penggunaan dana publik.

4. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu masyarakat mengetahui apakah pengumpulan pajak pada periode pelaporan cukup untuk mendanai semua pengeluaran pemerintah, atau apakah sebagian dari beban akan ditanggung oleh pembayar pajak di masa mendatang.

5. Evaluasi Kinerja

Menganalisis efisiensi entitas pelapor. Khususnya dalam mencapai kinerja pemerintah yang dimaksud melalui pengelolaan faktor produksi dibawah kuasa pemerintah.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, LKPP dan LKPD merupakan alat ukur akuntabilitas dan penentuan kebijakan sosial, politik, dan ekonomi.

1. Berikan rincian terkait sumber, pemanfaatan, serta alokasi anggaran.
2. Memberi informasi terkait kecukupan pendapatan tahun berjalan guna menutup semua pengeluaran.
3. Perincian penggunaan sumber daya yang dihabiskan untuk operasi entitas pelapor dan hasil yang diperoleh.
4. Memberi Informasi jumlah total arus kas yang dihasilkan oleh operasi dan bagaimana itu diinvestasikan oleh perusahaan pelapor.
5. Merincikan sumber pendapatan baik dalam jangka pendek hingga jangka panjang perusahaan pelapor, yang memuat penerimaan pajak dan obligasi, kemudian menjelaskan pengaruhnya terhadap situasi dan keadaan keuangan perusahaan.

6. Memberi informasi naik ataupun turunnya posisi keuangan entitas pelapor sebagai akibat dari aktivitas yang dilaksanakan selama periode pelaporan.

Peran kepala daerah terkait tanggung jawab atas pelaksanaan APBD diatur secara rinci dalam Pasal 320 UU nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintah daerah. Dalam kurun waktu enam bulan setelah periode anggaran berakhir, kepala daerah harus memberikan LKPD yang sudah diaudit BPK, dan rancangan peraturan daerah mengenai tanggung jawab pelaksanaan anggaran kepada DPRD. Peraturan daerah yang diusulkan oleh kepala daerah dan mengenai tanggung jawab pelaksanaan anggaran dibahas dan disepakati oleh kedua belah pihak tujuh (7) bulan setelah berakhirnya setiap tahun anggaran, diperlukan persetujuan bersama atas usulan peraturan daerah. Berdasarkan kesepakatan tersebut, kepala daerah akan membuat peraturan kepala daerah untuk menetapkan tanggung jawab pelaksanaan anggaran.

2.1.6 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Terkait Sistem Pengendalian Internal Pemerintah termasuk mengutip dari yang dikembangkan organisasi *The Committee of Sponsoring Organization* (COSO). Yang dimaksud dengan "pengendalian internal" yaitu upaya bersama dewan komisaris, manajemen, dan karyawan untuk memastikan keberhasilan dan efisiensi organisasi dalam menjalankan operasinya, keakuratan pelaporan keuangannya, dan kepatuhannya terhadap semua undang-undang dan peraturan yang relevan (COSO, 2013).

Menurut COSO (2013), Sistem Pengendalian Internal yang sukses memerlukan integrasi 5 komponen. Kelima komponen itu yakni:

- a. Lingkungan Pengendalian, pedoman yang jadi landasan struktur pengendalian. Kewenangan untuk mengembangkan kebijakan nilai integritas yang etis dan tidak bisa diterima berada pada manajemen puncak.
- b. Penilaian Risiko, Secara khusus, proses berkelanjutan untuk mengevaluasi rintangan potensial untuk mencapai tujuan dan memutuskan manajemen risiko. Dalam hal ini, penilaian risiko tidak terbatas pada kemungkinan penyampaian laporan keuangan palsu; itu juga harus memeriksa lingkungan eksternal dan internal.
- c. Aktivitas Pengendalian (Control Activities), tindakan dikendalikan oleh aturan dan prosedur untuk menurunkan risiko mencapai tujuan organisasi. Semua tingkat dan fase operasi perusahaan dan pelaporan keuangan tunduk pada kontrol. Otorisasi, rekonsiliasi, evaluasi, dan pemisahan tanggung jawab adalah contoh kontrol aktivitas.
- d. Informasi dan Komunikasi, Pengetahuan penting untuk kontrol internal dan proses pelaporan keuangan. Mempertahankan jalur komunikasi yang terbuka penting dalam mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal. Dalam definisi lain, Dalam kurun waktu tertentu, informasi dan komunikasi mengacu pada proses menemukan, mengumpulkan, dan menyebarkan data di dalam suatu organisasi agar karyawan bisa melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tanggung jawab internal dan eksternalnya.
- e. Pemantauan (Monitoring), adalah upaya untuk menjamin kelima komponen pengendalian intern tetap ada dan berjalan sebagaimana mestinya. Jika penyimpangan dan kekurangan ditemukan, dewan direksi segera diberitahu. Kelima komponen pengendalian intern itu saling bergantung

dan tidak terpisahkan sehingga harus diimplementasikan dalam setiap aktivitas entitas.

2.1.7 Kepatuhan Perundang-undangan

Kepatuhan atas Perundang-undangan termasuk indikator penting untuk diperhatikan dan wajib dilakukan dalam mengaudit laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan dari tingkat bagian dan lokal diharuskan menyertakan referensi SAP, khususnya PP No. 71 Tahun 2010. Karena undang-undang ini, semua organisasi entitas, termasuk pemerintah negara daerah maupun pusat, harus mematuhi kerangka kerja yang seragam saat menyusun anggaran tahunan mereka. laporan keuangan untuk konsumsi publik.

BPK-RI sudah menetapkan ketidakpatuhan pada undang-undang berlandaskan potensi dampak ketidakpatuhan pada pelaporan keuangan. Dampak ketidakpatuhan pada aturan dibagi lagi sebagai berikut:

1. Pengungkapan kerugian yang diderita oleh BUMN/BUMD yang mengakibatkan pengurangan kekayaan negara / daerah baik dalam bentuk uang, portofolio, atau barang-barang berwujud dan berharga yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan.
2. Temuan perbuatan melawan hukum pada perusahaan-perusahaan milik negara/daerah, baik disengaja maupun tidak hati-hati, yang meningkatkan kerugian pada masa mendatang berupa berkurangnya aset, uang tunai, dan harta kekayaan secara nyata dan jelas.
3. Adanya kekurangan pendapatan negara / daerah atau BUMN yang mengungkapkan uang yang secara sah menjadi milik negara/daerah atau badan usaha milik negara / daerah tetapi belum disetorkan ke kas atau rekening bank yang bersangkutan.

4. Temuan administrasi menyangkut ketidaksesuaian dalam pelaksanaan anggaran, aset, dan operasional perusahaan; namun, ketidaksesuaian ini tidak berdampak pada kerugian atau kemungkinan kerugian negara, daerah, atau badan usaha milik negara atau daerah, dan tidak ada unsur tindak pidana.
5. Ada anggapan bahwa suatu perbuatan memenuhi unsur kejahatan yang terdapat dalam perundang-undangan dan ditindak hukum apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidana.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa studi terdahulu tentang hal-hal yang memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan diantaranya:

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

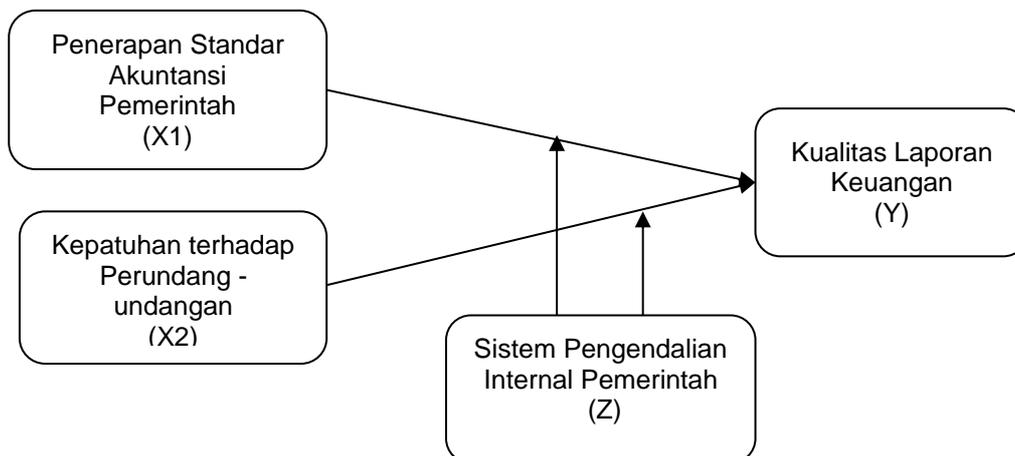
| NO | Peneliti | Judul | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--|---|-------------------|---|
| 1 | Mawuntu, N.S.,dkk.2020 .Universitas Sam Ratulangi | Pengaruh Kepatuhan Dan Pengawasan Terhadap Kualitas LKPD(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara) | Kuantitatif | Kepatuhan Undang-Undang berpengaruh positif signifikan pada kualitas LKPD |
| 2 | Azzindani, Pituringsih, & Irwan, M. (2019). <i>Jurnal Akuntansi</i> , 27, 418-445. | Pengaruh Implementasi SIMDA, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Penerapan SAP Terhadap Kualitas LKPD Lombok Tengah. | Kuantitatif | Penerapan SAP tidak berpengaruh pada Kualitas LKPD |
| 3 | Jati, B. P. (2019). <i>Journal Ekonomi Wahana</i> , | Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan | Kuantitatif | Kualitas informasi LKPD meningkat setelah SAP diterapkan |

| | | Pemerintah Daerah | | |
|---|--|---|-------------|--|
| 4 | Adhitama. 2019 | Analisis determinan kualitas informasi laporan Keuangan pemerintah daerah dengan sistem Pengendalian internal sebagai Variabel moderasi | Kuantitatif | a) SAP memiliki pengaruh signifikan positif pada Kualitas Informasi LKPD b) SPIP tidak mampu menjadi moderasi pengaruh SAP dan Kualitas LKPD. |
| 5 | Ilmi Farikhoh.2019 | Peran Pemanfaatan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating Dari Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Informasi Keuangan | Kuantitatif | a. SAP Berpengaruh pada Kualitas LKPD b. SPIP memoderasi SAP dan Kualitas LKPD |
| 6 | Rahmadani, & Zulaika, N. (2023) | Pengaruh Penerapan SAP, Kompetensi SDM, Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan | Kuantitatif | a. SAP Berpengaruh pada Kualitas LKPD b. SPI memoderasi SAP dan Kualitas LKPD |
| 7 | Khairudin,dkk. 2021. Universitas Bandar Lampung. | Kualitas LKPD:Peran Pengungkapan, SPI dan Kepatuhan pada Undang-Undang | Kuantitatif | Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan memiliki pengaruh negatif pada kualitas LKPD |

Sumber: Diolah dari berbagai penelitian terdahulu

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang masalah, landasan teori, dan hasil penelitian sebelumnya, maka dihasilkan kerangka pemikiran sebagai berikut yang berfungsi sebagai acuan dalam merumuskan hipotesis penelitian.



Bagan 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

2.4 Hipotesis

Hipotesis termasuk anggapan awal atas rumusan masalah, yang sudah diberi dalam bentuk kalimat tanya di awal.. Penelitian ini dilakukan guna memperoleh pengetahuan mengenai Kualitas LKPD Pemerintah Daerah. Hipotesis yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

2.4.1 Pengaruh Penerapan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar

SAP sangat diperlukan menurut *signalling theory* dalam konteks pemerintahan, untuk menjaga konsistensi dalam penyajian dan pembuatan laporan keuangan. Jika tidak ada kriteria penyusunan laporan keuangan, maka akan terjadi inkonsistensi yang akan menurunkan kualitas informasi yang dimuat pada laporan keuangan dan mempersulit audit (Sari, 2013).

Menerapkan SAP berdampak positif signifikan pada LKPD yang mengalami peningkatan kualitas, menurut Jati (2019). Rahmadani (2018) dan

Farikhoh (2019) memberi lebih banyak bukti dengan memperlihatkan bahwasanya penggunaan SAP memiliki pengaruh positif dengan kualitas LKPD. Ketika aturan akuntansi pemerintah diterapkan secara konsisten, Ini akan mengarah kepada pelaporan keuangan dengan kualitas yang baik. Namun adanya pertentangan dari penelitian Azzindani *et al.*(2019) menyatakan SAP telah diwajibkan sehingga tidak merubah apapun dari kualitas LKPD dan Susilatri (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah yang baru masih belum terbentuk dengan baik. maka dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas LKPD Kabupaten Polewali Mandar.

2.4.2 Pengaruh Kepatuhan Perundang-undangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Pernyataan Standar Pemeriksaan SPKN untuk merencanakan audit agar mengungkap pelanggaran hukum atau peraturan yang mungkin memiliki "dampak langsung dan substansial" terhadap laporan keuangan. Ini ialah salah satu pekerjaan lapangan tambahan. Uji kepatuhan bagi pemeriksa ini dimaksudkan untuk memberi keyakinan yang wajar bahwasanya tidak ada salah saji material yang dapat menyebabkan penerima informasi salah menginterpretasikan laporan keuangan.

Penelitian sebelumnya oleh Mawuntu *et al.* (2021) dan Habiby dan Ritonga (2020) memperlihatkan bahwasanya Kepatuhan atas Perundang-undangan berpengaruh positif terhadap Kualitas LKPD, namun Khairudin *et al* (2017) memperlihatkan bahwasanya kepatuhan pemerintah pada peraturan perundang-undangan berpengaruh negatif dikarenakan dalam kenyataan dalam peraturan yang telah ada sengaja dilanggar dengan maksud tertentu oleh

berbagai oknum namun juga tidak dilakukan pemberian sanksi secara tegas. Fitriana *et al.* (2020) menyatakan bahwa kepatuhan pada perundang-undangan berpengaruh terhadap opini LKPD dengan arah pengaruh negatif dan signifikan. Jika pemerintah memperlihatkan kepatuhan hukum yang kuat, jumlah temuan pelanggaran kepatuhan akan menurun. Kualitas LKPD akan semakin meningkat bila tidak terdapat temuan pelanggaran kepatuhan. Berdasarkan uraian di atas, dibentuk hipotesis sebagai berikut.

H₂ : Kepatuhan atas Perundang-undangan berpengaruh positif terhadap Kualitas LKPD Kabupaten Polewali Mandar

2.4.3 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memperkuat hubungan antara Penerapan Standar Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Pasal 2 ayat 3 Peraturan PP no. 60 Tahun 2008, penyelenggaraan sistem pengendalian internal oleh pemerintah dilakukan sesuai dengan efektif dan efisien pada pencapaian tujuan negara, andal dalam membuat dan menyampaikan laporan keuangan, mengamankan kekayaan negara, serta kepatuhan atas peraturan yang berlaku.

Menurut Hartono dan Ramdany (2020), yang menyatakan bahwasanya pemasangan SPIP berdampak besar pada kualitas laporan keuangan, memberi lebih banyak bukti atas klaim tersebut. Dari penelitian terdahulu memberi asumsi bahwa adanya SPI yang diterapkan pemerintah daerah dalam penyusunan dan penyajian LKPD sesuai dengan SAP memiliki pengaruh positif atas kualitas LKPD. Penelitian oleh Rahmadani dan Zulaikha (2023) mendukung gagasan bahwa SPI memoderasi SAP dan kualitas LKPD. Penelitian Farikhoh (2019), Fauziyah (2019) dan Putri dan Simanjuntak (2023) juga memberikan hasil yang sama dimana sistem pengendalian internal pemerintah dapat memoderasi dalam hubungan SAP dan Kualitas LKPD. menunjukkan hasil yang sama. Namun

Jauhari *et al.* (2021) memberi pernyataan yang bertentangan yaitu sistem pengendalian intern pemerintah tidak memoderasi pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan, maka dibentuk hipotesis yaitu.

H₃ : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memoderasi Hubungan antara Penerapan SAP dan Kualitas LKPD Kabupaten Polewali Mandar.

2.4.4 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memperkuat hubungan antara Kepatuhan Perundang-Undangan dan Kualitas Laporan Keuangan

Sistem pengendalian Internal dan Kepatuhan perundang-undangan memiliki kesamaan terhadap kualitas laporan keuangan. Keduanya termasuk jenis pemeriksaan BPK yang tercantum dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. Nirwana dan Haliah (2018) menyatakan bahwa adanya regulasi tingkat tinggi yang harus dipatuhi pemerintah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Rahmasari (2017) Pelanggaran atas perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh entitas pelapor di Indonesia memberi pengaruh negatif dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas.

Aswar *et al.* (2021) menyatakan bahwa konsistensi penerapan pengendalian internal akan meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangan karena pengawasan dapat meningkatkan kepatuhan peraturan perundang-undangan dan anggaran pemerintah daerah. Namun hasil tersebut bertentangan dengan Adhitama (2019) menyatakan bahwa pengendalian internal tetap menimbulkan penyimpangan terhadap perundang-undangan yang berdampak pada kualitas laporan keuangan seperti pencairan ganda yang dapat menimbulkan kerugian negara. Berdasarkan uraian diatas terlihat adanya kaitan erat mengenai peran SPIP terhadap hubungan Kepatuhan Perundang-undangan dan Kualitas LPKD sehingga dibentuk hipotesis yaitu.

H₄ : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memoderasi Hubungan antara Kepatuhan Perundang-undangan dan Kualitas LKPD